



**Identitas dan Kepentingan Indonesia Berpartisipasi dalam
UN Peacekeeping Operations pada Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono**

Rani Eka Syahputri

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Conflict is an intrinsic aspect that can not be avoided in social conditions. UN Peacekeeping Operations (UN PKO) became a form of UN to help conflict nations become peaceful by building military, police and civil forces. Indonesia is one of the most active and sustainable countries within the United Nations PKO since 1957. In the era of Susilo Bambang Yudhoyono's administration, Indonesia's participation and commitment to UN PKO has received international attention for having achieved more than once. This study then has a purpose to know the results of changes in Indonesia's commitment in the United Nations PKO in the era of SBY. This research uses constructivism paradigm. The method used in this research is explanative type research. The result of the change in Indonesia's commitment to PKO of the United Nations is because SBY interpreted Indonesia's identity as 'one million zero friend enemies' and as a member state of the UN. The identity then spawned a set of interests that motivated Indonesia to increase participation in the PKO of the United Nations.

Keywords: *UN Peacekeeping Operations, Indonesia, participation, commitment, identity, interests*

Pendahuluan

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disingkat PBB merupakan organisasi atau forum internasional yang memiliki tujuan memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Dalam hal menangani situasi konflik, PBB memiliki “*flagship enterprise*” bernama *UN peacekeeping operations* (UN PKO)/Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) yang berada di bawah wewenang Dewan Keamanan (Kemlu 2016). OPP PBB pertama kali dilakukan pada tahun 1948 dimana DK PBB mengirimkan pasukan pengamat militer PBB ke Timur Tengah yang disebut dengan misi *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO). Tugas misi tersebut adalah untuk memantau Kesepakatan Gencatan Senjata antara Israel dan tetangganya di Arab. Setelah UNTSO, PBB mengadakan misi perdamaian kembali yaitu *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP) pada tahun 1949 dan *First UN Emergency Force* (UNEF I) tahun 1956 (Roser, Max & M. Nagdy 2018).

Sejalan dengan operasi pemeliharaan perdamaian PBB, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif dalam memberikan kontribusinya. Indonesia pertama kali memberikan bantuan pasukan penjaga perdamaian PBB pada tahun 1957 dengan mengirimkan Kontingen Garuda/Konga I dengan jumlah 559 personil militer untuk bertugas menjaga perdamaian di wilayah Terusan Suez, Mesir. Namun dalam dekade terakhir, Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan berpartisipasi dalam OPP PBB tepatnya ketika era Presiden SBY. Mulanya pada 31 Januari 2004, Indonesia

berpartisipasi dengan kontingen berjumlah 201 personil dan berada pada peringkat 42 di dunia dari 94 negara kontributor OPP PBB. Kemudian pada 31 Januari 2014, peringkat Indonesia meningkat menjadi 19 dari 122 negara kontributor dengan jumlah kontingen 1.783 personil (termasuk 33 *peacekeeper* wanita) yang terdiri dari 3 *individual police* dan 140 *Formed Police Units* (FPU), 19 *military observers*, dan 1.586 personil TNI (Hutabarat 2014, p. 187). Selain itu juga terdapat bukti keseriusan SBY lainnya untuk menguatkan komitmen berpartisipasi Indonesia dalam UN PKO. Pertama, adanya pembentukan Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011, tentang pembentukan Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP). Kedua, Indonesia pertama kali memberikan bantuan tiga unit helikopter dalam pelaksanaan misi perdamaian PBB (2013) serta menjadi negara Asia pertama dan satu-satunya mengirimkan kapal perang dalam misi *Maritime Task Force* (MTF) di Lebanon (2009). Ketiga, mendirikan PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) yang berlokasi di kawasan *Indonesia Peace and Security Center* (IPSC), Sentul, Bogor. Peningkatan komitmen yang dilakukan SBY tersebut belum pernah terjadi sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu mengapa terjadi penguatan komitmen berpartisipasi Indonesia dalam *UN peacekeeping operations* pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya komitmen berpartisipasi Indonesia dalam *UN peacekeeping operations* pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi tindakan itu. Alasan dipilihnya jangkauan penelitian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena pada saat itu mulai terjadi peningkatan komitmen berpartisipasi Indonesia dalam UN PKO baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Penelitian ini menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan paradigma konstruktivisme dengan konsep identitas. Argumen utama dari konsep kebijakan luar negeri bahwa suatu negara akan menjalin hubungan dengan aktor lain dalam politik dunia dengan maksud memperjuangkan atau mempertahankan kepentingan nasionalnya (Jemandu, Aleksius 2008, p. 61). Sehingga dengan melakukan analisis terhadap kebijakan luar negeri, tindakan serta perilaku negara terhadap negara lain dan lingkungan internasional pada umumnya dapat dipahami (Breuning 2007, p. 5). Kemudian, paradigma konstruktivisme berargumen bahwa pengambilan suatu kebijakan dilakukan tidak berdasarkan pada kepentingan diri sendiri (*self-help*) tetapi lebih disebabkan oleh adanya atribut/identitas yang melekat pada negara (aktor) (Wendt 2004, p. 289). Identitas dianggap penting karena ketika aktor mengetahui mengenai siapa dirinya maka ia menjadi tahu apa saja yang dapat/harus/ingin dilakukan. Logika analisis kebijakan luar negeri berbasis identitas dalam paradigma konstruktivisme yaitu identitas mempengaruhi kepentingan suatu aktor, kemudia kepentingan tersebut menjadi motivasi yang mendorong aktor mengambil tindakan atau kebijakan.

Berdasarkan kedua kerangka pemikiran tersebut, hipotesis dari penelitian ini adalah menguatnya komitmen berpartisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB disebabkan oleh gagasan/persepsi pemimpin (Susilo Bambang Yudhoyono) mengenai identitas Indonesia.

Pembahasan

Partisipasi Indonesia dalam UN Peacekeeping Operations pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Partisipasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB berawal dari Negara Mesir atau dikenal dengan misi perdamaian *United Nations Emergency Force* (UNEF). Pasukan perdamaian pertama Indonesia yang disebut dengan Konga I terdiri dari pasukan tentara dengan kekuatan sebanyak 559 personil. Partisipasi masih berlanjut, pada bulan

Oktober 1960 Indonesia kembali mengirimkan satu batalyon atau Konga II dengan kekuatan sebesar 1.144 personil tentara untuk bertugas dalam *UN mission in the Congo* (ONUC). Namun, setelah peristiwa pertumpahan darah yang terjadi di Indonesia pada bulan Oktober 1965 (paska peristiwa G30S/PKI), partisipasi TNI dalam pemeliharaan perdamaian PBB mengalami penurunan. Pada tahun 1971 dalam *International Commission for Control and Supervision (ICCS)*/ Komisi Internasional Pengendalian dan Pengawasan di Vietnam Selatan, TNI hanya mampu berperan kecil. Kemudian pada Juni 1975 kontribusi pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia berhenti hingga akhir Perang Dingin dikarenakan kondisi wilayah Vietnam yang semakin memburuk. Indonesia terlihat meningkatkan perannya kembali ketika diadakan misi *United Nations Transitional Authority in Cambodia* (UNTAC) pada tahun 1992-1994 oleh Dewan Keamanan dan berhasil melakukan negosiasi untuk pelepasan enam personil UNTAC yang di sandera oleh Khmer Rouge¹. Di tahun 2000, ketika mengalami krisis ekonomi dan politik, Indonesia hanya menempatkan 44 personil untuk melaksanakan PKO PBB di Timor Leste (David Capie 2016, p. 7). Lihat Grafik 1 untuk frekuensi jumlah personil pasukan penjaga perdamaian Indonesia 2000-2015.

Grafik 1
Frekuensi Jumlah Personil Pasukan Penjaga Perdamaian Indonesia 2000-2015



Sumber: Diolah dari UN Peacekeeping n.d

Seiring perkembangannya, ketika SBY memulai masa jabatan sebagai presiden beliau langsung menunjukkan tekadnya untuk mengirimkan lebih banyak personil pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia kepada PBB. Di tahun pertama pemerintahan (2004), SBY langsung memberikan amanah kepada 144 insinyur militer dan staff medis untuk bertugas di Negara Republik Demokratik Kongo sebagai bagian dari misi perdamaian *UN Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUC) (David Capie 2016, p. 8). Pada tahun 2006, SBY menyanggupi untuk pertama kalinya Indonesia mengirimkan pasukan penjaga perdamaian sebanyak 850 personil militer untuk menjadi bagian dari UNIFIL di Lebanon (UN Peacekeeping 2006). Namun pengiriman pasukan ke

¹ Khmer Rouge atau Khmer Merah merupakan Partai Komunis yang pernah berkuasa di Kamboja dan dipimpin oleh Pol Pot..

Libanon baru dilakukan pada tahun 2007-2008 sebab PBB menunda keberangkatan pasukan perdamaian dari negara-negara Asia pada bulan September 2006. Pada tahun 2007 enam polisi Indonesia pertama kali ditugaskan ke Sudan untuk bergabung menjalankan misi *United Nations Mission in Sudan* (UNMIS) (David Capie 2016, p.8). Kemudian pada tahun berikutnya (2008) diikuti dengan pengiriman *Formed Police Unit* (FPU) sebanyak 150 personil untuk berangkat ke Darfur mengikuti misi *United Nations Mission in Darfur* (UNAMID). Selanjutnya, pada tahun 2009 Indonesia juga menjalankan mandat DK PBB yaitu Resolusi 1325 (2000) untuk melibatkan wanita dalam proses perdamaian termasuk operasi perdamaian PBB (TNI AU 2014). Terhitung sejak tahun 2009 - 30 Mei 2014, terdapat 33 *women peacekeeper* Indonesia yang telah diterjunkan yang terdiri dari 1 personil di UNAMID, Sudan dan 32 personil di UNIFIL, Lebanon (Hutabarat 2014, p. 192).

Selain bukti peningkatan komitmen berpartisipasi Indonesia dalam UN PKO dalam bentuk jumlah personil, SBY juga memberikan dukungan dalam bentuk kualitas partisipasi Indonesia seperti menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian/TKMPP. TKMPP merupakan tim kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan partisipasi Indonesia pada misi-misi pemeliharaan perdamaian dunia berdasarkan kepentingan nasional (Kemlu 2016). Selain itu adanya pembangunan Pusat Pelatihan Pemeliharaan Perdamaian Nasional /PMPP yang berlokasi di kawasan Canti Dharma, Desa Sukahati, Kecamatan Citeureup Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Brigjen TNI A.M Putranto selaku Komandan PMPP TNI memberikan keterangan bahwa PMPP sebagai pusat pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan secara profesional bagi Pasukan Garuda yang akan melaksanakan tugas di berbagai misi (Youtube, 2015). Peresmian bangunan PMPP dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2011 oleh Presiden SBY didampingi dengan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II seperti Menko Politik, hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pendidikan Nasional M Nuh dan lainnya (www.kemhan.go.id 2011).

Analisis Menguatnya Komitmen Berpartisipasi Indonesia dalam UN Peacekeeping Operations pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis mengenai penyebab yang mendorong keseriusan Indonesia atas upayanya untuk berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di era Presiden SBY dengan menggunakan kerangka pemikiran dari konstruktivisme, yaitu dimana identitas dan kepentingan menjadi faktor yang dapat menjelaskan tindakan suatu negara.

Identitas Indonesia

Indonesia memiliki atribut yang membuatnya berbeda dengan negara lainnya yaitu berpegang teguh pada prinsip politik luar negeri “Bebas-Aktif”. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri “Bebas-Aktif”. Prinsip ini dikategorikan sebagai identitas personal karena merupakan bagian dari jati diri yang membuat Indonesia berbeda dengan negara-negara lainnya dan kemunculnya juga bukan hasil dari intersubjektivitas. Prinsip bebas-aktif dikemukakan pertama kali oleh Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden RI pertama ketika berpidato dalam sidang BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) pada tanggal 2 September 1948. Saat itu kata “Bebas” merujuk pada makna “bebas menentukan sikap dan pandangan terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari kutub-kutub dominan kekuatan dunia.” Sedangkan istilah

“Aktif” yaitu “ikut memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan dunia” (interseksi.org 2015).

Namun identitas tersebut mengalami reinterpretasi makna oleh SBY agar dapat menghadapi situasi dan kondisi global di era globalisasi dimana tantangan menjadi lebih kompleks dan ancaman keamanan menjadi lebih beragam, yang kemudian dianalogikan SBY dengan “*navigating a turbulent ocean*” atau “berlayar di tengah samudera yang bergejolak” (Kemlu 2005). “*A million friends zero enemy*” (“sejuta kawan tanpa satupun lawan”) dan “*all direction foreign policy*” (“politik luar negeri kesegala arah”) merupakan gagasan yang digunakan SBY untuk merepresentasikan politik bebas-aktif Indonesia. Maksud dari gagasan tersebut agar Indonesia mampu mengubah musuh menjadi teman, dan mengubah teman menjadi mitra; memiliki kapasitas diplomatik, intelektual dan emosional untuk menanggapi isu-isu kebijakan luar negeri yang rumit; dan tidak mempercayai teori konspirasi, kecurigaan yang berlebihan, bersikap terlalu defensif, atau rasa takut bahwa dunia akan menguasai kita (Kemlu 2005).

Identitas lainnya bahwa Indonesia merupakan negara anggota PBB. Ini merupakan identitas kolektif Indonesia karena menganut logika kelompok dimana aktor internasional bertindak secara altruistik (berdasarkan kepentingan bersama) atau menganut credo ‘satu untuk semua, semua untuk satu’ (Rosyidin 2015, pp. 57-58). Secara resmi Indonesia menjadi negara anggota PBB ke-60 sejak tanggal 28 September 1950 dan masih berlangsung hingga sekarang (2018).

Kepentingan Indonesia

Mengenai gagasan “*a million friends zero enemy*”, terdapat lima poin yang hendak dicapai Indonesia, yaitu (Kemlu, 2005): (1) Indonesia harus memiliki kapasitas diplomatik, intelektual dan emosional dalam merespon isu-isu luar negeri yang sangat kompleks. Ketakutan akan teori konspirasi, rasa curiga yang berlebihan, dan sikap defensif atau *xenophobia* harus dijauhkan. Agar Indonesia dapat menjadi pencipta perdamaian (*peace maker*), pembangun kepercayaan (*confidence-builder*), penyelesaian masalah (*problem-solver*), dan pembangun hubungan (*bridge-builder*); (2) “*A million friends zero enemy*” mengandung makna bahwa Indonesia tidak akan menganggap negara lain sebagai musuh atau ancaman. Namun Indonesia juga tidak akan bergabung dengan aliansi militer manapun. Indonesia tidak akan mengizinkan atau membiarkan pangkalan militer asing berada di wilayah kedaulatan Indonesia. Melainkan Indonesia akan memperkuat perdamaian dan stabilitas regional maupun internasional; (3) Tujuan “*a million friends zero enemy*” adalah ingin membangun “konektivitas” karena jaringan yang luas akan membantu kinerja politik bebas-aktif Indonesia. Prinsip bebas-aktif melahirkan kewajiban bagi Indonesia untuk terlibat secara aktif dalam setiap isu internasional yang tentunya memiliki pengaruh terhadap kepentingan nasional Indonesia; (4) “*A million friends zero enemy*” sebagai identitas internasional Indonesia, yaitu bagaimana masyarakat Indonesia mencerminkan diri sebagai masyarakat internasional, maka apa yang diderita masyarakat internasional menjadi derita masyarakat Indonesia juga. Presiden SBY menginginkan Indonesia menjadi negara dengan identitas yang solid, tetapi juga identitas internasional yang kuat; (5) “*A million friends zero enemy*” sebagai cerminan nasionalisme sejati bangsa Indonesia yang tidak arogan, sempit ataupun ultra-nasionalisme. Melainkan nasionalisme Indonesia cenderung terbuka, percaya diri, moderat, toleran, dan *outward looking*. Dengan nasionalisme seperti itu, Indonesia dipercaya akan dihormati oleh negara tetangga, wilayah regional, dan dunia internasional.

Sedangkan mengenai identitas Indonesia sebagai negara anggota PBB, maka kepentingan Indonesia yaitu memenuhi kewajiban terhadap Piagam PBB pada Pasal 2 ayat 3 disebutkan:

“Seluruh anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.”

Dan ayat 5 yang berbunyi:

“Semua anggota harus memberikan segala bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam suatu tindakannya yang diambil sesuai dengan Piagam ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada sesuatu negara yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenakan tindakan-tindakan pencegahan atau larangan.”

Pelaksanaan UN Peacekeeping Operations oleh Indonesia

Mengenai pelaksanaan UN PKO atas kepentingan Indonesia dari identitas “*a million friends zero enemy*”. Pertama, memiliki kapasitas diplomatik, intelektual dan emosional. Kebijakan untuk berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB adalah bagian dari upaya diplomasi Indonesia agar tercipta kondisi damai di dunia. Bagi SBY diplomasi adalah cara untuk mendukung, menunjang, dan mencapai kepentingan nasional (ditpolkom.bappenas.go.id 2008). Seperti yang diketahui bahwa Indonesia memiliki tujuan negara untuk menjadi *peace maker*. Ketika bertugas dalam operasi pemelihara perdamaian, pasukan perdamaian Indonesia tidak hanya bertugas sebagai penjaga perdamaian melainkan juga melakukan pendekatan dan negosiasi dengan masyarakat setempat agar situasi kondusif dapat tercipta di wilayah operasional (Tabloid Diplomasi, 2010). Sehingga dengan terlibat dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB, Indonesia memiliki kapasitas diplomatik. Kemudian, mengingat ruang lingkup operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang multidimensional maka Indonesia juga berkesempatan untuk terlibat dalam berbagai isu internasional. Seperti ketika menjalankan misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon, pasukan Indonesia telah menyertakan kegiatan CIMIC (*Civil-Military Coordination*). Adapun kegiatan yang ditujukan untuk anak-anak yaitu Smart Car², kursus bahasa Inggris dan komputer, pengobatan massal, pembangunan taman bermain, menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional di Lebanon dan kegiatan lainnya. Bagi remaja, Konga melakukan pembangunan lapangan sepak bola, pertandingan sepak bola dan bola volley, pelatihan P3K, kursus komputer dan bahasa Inggris, dan kegiatan lainnya. Sedangkan untuk masyarakat lain dilakukan pendekatan seperti silaturahmi dengan tokoh masyarakat setempat, membantu memanen gandum, pengobatan massal, memadamkan kebakaran dan memberikan bantuan ketika dibutuhkan masyarakat, serta merenovasi rumah untuk dijadikan pusat kegiatan masyarakat (Tabloid Diplomasi 2010).

Kedua, mengembangkan postur yang dapat memperkuat perdamaian dan stabilitas regional maupun internasional. Keberhasilan suatu operasi pemeliharaan perdamaian PBB tentu salah satunya didukung oleh kemampuan para pasukan perdamaian yang profesional dan mumpuni. Dalam rangka memperkuat upaya penciptaan perdamaian dunia, Indonesia berusaha menyiapkan pasukan perdamaian yang dapat bekerja dengan gigih, semangat dan tekad kuat dengan mengambil langkah membangun PMPP (Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian) di Sentul, Bogor pada tahun 2010. Fasilitas pelatihan tersebut dibangun sebagai wujud dari upaya Indonesia untuk memperkuat postur pasukan penjaga perdamaian Indonesia agar lebih siap bertugas dalam membantu negara-negara yang mengalami kesulitan/konflik. Dikarenakan bertugas di daerah konflik tidak mudah maka

² *Smart Car* adalah mobil berisi mainan anak-anak yang nantinya akan berkeliling dari satu desa ke desa lainnya dan anak-anak juga dapat menyaksikan pertunjukan sulap, mengikuti perlombaan menggambar, dll. Mobil pintar ini merupakan pemberian dari Ibu Ani Yudhoyono untuk dapat menghibur anak-anak di Lebanon Selatan (Okezone 2008).

dibutuhkan wadah yang dapat melatih kecerdasan berpikir, kerjasama, loyalitas serta kesiapan fisik dan mental yang tinggi bagi pasukan penjaga perdamaian yang akan bertugas.

Prajurit yang akan diberangkatkan untuk bertugas dalam operasi pemeliharaan perdamaian harus melaksanakan PDT (*Predeployment Training*) selama kurang lebih 30 hari di PMPP. Para prajurit akan mendapatkan pelatihan untuk kegiatan operasional dan administrasi yang sesuai dengan *Standar Operations Procedure* (SOP) dan *Role Of Engagement* (ROE) di daerah misi serta tuntutan dari operasi penugasannya. Pembekalan materi diberlakukan kepada seluruh personil pasukan penjaga perdamaian yang akan berangkat bertugas tanpa adanya pemisahan jabatan. Secara umum latihan yang diberikan di PMPP meliputi kegiatan secara tehnik, taktik, dan prosedur (Rachman 2013, pp. 29-30).

Ketiga, membangun konektivitas. Apabila Indonesia ikut berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB maka akan terjadi interaksi langsung baik dengan masyarakat lokal maupun kepada beberapa kontingen dari negara lain. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika ikut berkontribusi dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB dan juga selama mendapat persetujuan dari pihak yang bertingkal/tuan rumah maka *networking* atau hubungan multilateral Indonesia dapat terbangun. Jika dilihat dari perkembangannya, partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB sejak tahun 1957 hingga era pemerintahan SBY (2014) juga mengalami perluasan tidak hanya terbatas pada satu kawasan saja. Melainkan sudah mendunia yaitu meliputi benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika Utara, dan Timur Tengah. Partisipasi tersebut dapat dilihat di bab sebelumnya pada tabel 2.2.

Keempat, menunjukkan identitas internasional Indonesia sebagai negara yang aktif. Partisipasi Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB di era SBY dilakukan dengan aktif. Keaktifan ini dapat dilihat dari perkembangan peringkat Indonesia sebagai negara kontributor OPP PBB di era Presiden SBY. Selain itu Indonesia juga melibatkan beberapa unit armada seperti helikopter dan kapal perang untuk mendukung kinerja misi perdamaian PBB.

Kelima, mendapat penghormatan dari negara tetangga, wilayah regional ataupun dunia internasional. tahun 2009 Monuc *Force Commander*, Letnan Jenderal Babacar Gaye, dalam lokakarya SEA (*Sexual and Exploitation Abuse*) memberikan apresiasinya terhadap Kontingen Indonesia agar seluruh kontingen yang tergabung dalam misi PBB di Kongo dapat mencontoh kinerja pasukan garuda yang dinilai tidak pernah tersangkut masalah eksploitasi dan penyalahgunaan seksual (www.tni.mil.id 2009). Indonesia juga mendapat apresiasi melalui majalah UNFIL atau Al Janud (dalam bahasa Arab) dengan terpampangnya gambar Kontingen Garuda di bagian halaman cover (Tabloid Diplomasi 2010). Diakui oleh Letnan Kolonel AM Putranto yang pernah bertugas sebagai Komandan Satuan Petugas Yonif Mekanis Konga XXIII-B/*The United Nations Interim Force in Lebanon* (Unifil) pada November 2007 hingga Desember 2008, bahwa pasukan perdamaian Indonesia memang mendapat tempat tersendiri di hati para warga Lebanon. Banyak masyarakat Lebanon yang mengharapkan prajurit TNI sebagai pasukan perdamaian untuk ditempatkan di daerah mereka karena sikapnya yang simpatik (Kompas 2010).

Sedangkan mengenai pelaksanaan UN PKO atas kepentingan Indonesia dari identitas sebagai negara anggota PBB. Kepentingan Indonesia untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB dapat tercapai dengan ikut berkontribusi dalam *UN Peacekeeping Operations*. Hal ini dikarenakan UN PKO telah dianggap sebagai "*flagship enterprise*" milik PBB yang berada dibawah kendali DK PBB dalam rangka menjaga dan memelihara perdamaian serta keamanan internasional, meskipun dalam Piagam PBB tidak tercantumkan. Sehingga kebijakan untuk aktif berkontribusi dalam UN PKO merupakan

sala satu bentuk bantuan yang diberikan anggota PBB untuk negara lain yang mengalami kesulitan/konflik melalui cara damai.

Kesimpulan

Kebijakan Indonesia untuk berkomitmen meningkatkan partisipasinya dalam UN *peacekeeping operations* pada era Presiden SBY dapat dijelaskan dalam pemikiran konstruktivis. Menurut konstruktivis, tindakan suatu negara didorong oleh atribut/identitas yang melekat pada negara itu sendiri karena ketika aktor mengetahui mengenai siapa dirinya maka ia menjadi tahu apa saja yang harus/dapat/ingin dilakukan.

Penelitian ini menemukan bahwa komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam UN PKO didorong oleh identitas personal Indonesia sebagai “*a million friends zero enemy*” dan identitas kolektif sebagai negara anggota PBB. Kedua identitas ini adalah jati diri negara Indonesia yang muncul akibat dari pemaknaan SBY. “*A million friends zero enemy*” mendorong Indonesia untuk dapat berteman dengan semua pihak dan membangun konektivitas yang luas. Gagasan ini muncul pada era SBY karena dunia abad 21 merupakan kondisi dimana tantangan menjadi lebih kompleks dan ancaman keamanan menjadi lebih beragam. SBY menganalogikan kondisi dunia tersebut dengan “*navigating a turbulent ocean*” atau “berlayar di tengah samudera yang bergejolak”. Sedangkan keanggotaan Indonesia dalam PBB, memberi dorongan untuk tetap konsisten memberikan bantuannya dalam menyelesaikan persengketaan internasional dengan langkah damai. Kebijakan Indonesia meningkatkan komitmen berpartisipasi dalam UN PKO ini selaras dengan tujuan dari kedua identitas tersebut. Dengan terlibat di berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB, Indonesia dapat memperluas hubungan pertemanan dan juga turut berperan dalam menciptakan keamanan dan perdamaian dunia.

Kebijakan Indonesia untuk meningkatkan komitmen partisipasinya dalam UN PKO dianggap SBY sebagai perilaku yang pantas untuk dilakukan (*logic of appropriateness*). Hal ini dikarenakan pada saat itu Indonesia memiliki kewajiban untuk dapat berteman dengan siapapun dan ikut berkontribusi menciptakan perdamaian bersama PBB. Maka meningkatnya komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam UN PKO membuktikan bahwa Indonesia tidak memiliki masalah jika harus ditugaskan di negara manapun dan selalu siap untuk membangun hubungan baik dengan siapapun. Selain itu, dengan berpartisipasi dalam UN PKO membuktikan pula bahwasanya Indonesia merupakan negara anggota yang loyal terhadap organisasi PBB karena mampu menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku didalamnya.

Referensi

- Breuning, Marijke 2007, *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*, Palgrave Macmillan, New York.
- Capie, David 2016, ‘*Evolving attitudes to Peacekeeping in ASEAN*’ dalam Katsuya Tsukamoto (ed), *New Trends in Peacekeeping: In Search of a New Direction*, National Institute for Defence Studies, Tokyo, pp. 111-125.
- Jemandu, Aleksius 2008, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rosyidin, Mohamad 2015, *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan Internasional*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Hutabarat, Leonard F 2014, ‘Indonesian Participation in the UN Peacekeeping as an Instrument of Foreign Policy : Challenges and Opportunities’, *Jurnal Global & Strategis*, vol. 8, no. 2 , pp.183-199.
- Wendt, Alexander 2004, ‘The State as person in international theory’ *Review of International Studies*, vol. 30. pp. 289-316.

- Asgart, Sofian M 2015, "Membaca Kebijakan Luar Negeri SBY dan Jokowi" *The Interseksi Foundation*, 29 Januari, dilihat 29 November 2017, <<http://interseksi.org/report/membaca-kebijakan-luar-negeri-sby-dan-jokowi/>>.
- Kementerian Pertahanan RI 2011, *Presiden Resmikan Fasdiklat Misi Perdamaian dan Keamanan*, 19 Desember, dilihat 1 Desember 2017, <<https://www.kemhan.go.id/2011/12/19/presiden-resmikan-fasdiklat-misi-perdamaian-dan-keamanan.html>>.
- Kemlu 2005, *Speech by H.E. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, President of the Republic of Indonesia before the Indonesian Council on World Affairs (ICWA)*, 20 Mei, dilihat 30 November 2017, <<https://www.kemlu.go.id/en/pidato/presiden/Pages/Speech-by-H.E.-Dr.-Susilo-Bambang-Yudhoyono-President-of-the-Republic-of-Indonesia-before-the-Indone.aspx>>.
- Kemlu 2016, *Indonesia dan United Nations Peacekeeping Operations*, 20 Januari, dilihat 9 November 2017, <<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Partisipasi-Indonesia-dalam-Pasukan-Misi-Perdamaian-PBB.aspx>>.
- Kompas.com 2010, *Konga Disegani Warga Lebanon dan Pasukan Lain*, 18 Maret, dilihat 20 Maret 2018, <<http://nasional.kompas.com/read/2010/03/18/1931347/konga.disegani.warga.lebanon.dan.pasukan.lain>>.
- Okezone.com 2008, *Teddy, Idola yang Diperebutkan Anak-Anak Lebanon*, 11 Februari, dilihat 21 Mei 2018, <<https://news.okezone.com/read/2008/02/11/223/82503/teddy-idola-yang-diperebutkan-anak-anak-lebanon>>.
- PMPP 2015, *Indonesian's Peacekeepers* online video, dilihat 1 Desember 2017, <https://www.youtube.com/watch?v=QDZv_4feGc>.
- Rachman, Arief 2013, *Penyiapan Satgas TNI dalam Misi Perdamaian sebagai Implementasi UU No. 34/2004*, e-book, Seskoad, Bandung, dilihat 17 Maret 2018, <http://seskoad.mil.id/admin/file/kajian/Kajian_TW_III_2013.pdf>.
- ¹Roser, Max & Mohamed Nagdy 2018, "Peacekeeping", *Our World In Data*, dilihat 10 Januari 2017, <<https://ourworldindata.org/peacekeeping>>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia 2008, *Sambutan Presiden Republik Indonesia pada Acara Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri*, 2 April, dilihat 17 Maret 2018, <[http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Daftar%20Pidato/1\)%20Presiden/Pidato%20Presiden%20Rakor%20Kepala%20Perwakilan%20RI.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Daftar%20Pidato/1)%20Presiden/Pidato%20Presiden%20Rakor%20Kepala%20Perwakilan%20RI.pdf)>.
- Tabloid Diplomasi 2010, *Kontingen Garuda dan Total Diplomasi*, dilihat 10 Maret 2018, <<http://www.tabloiddiplomasi.org/index.php/2010/04/14/kontingen-garuda-dan-total-diplomasi/>>.
- Tabloid Diplomasi 2010, *Kontingen Garuda XXIII-b UNIFIL di Lebanon Selatan*, dilihat 10 Maret 2018, <<http://www.tabloiddiplomasi.org/index.php/2010/04/14/kontingen-garuda-xxiii-b-unifil-di-lebanon-selatan/>>.
- TNI AU 2014, *Wanita Pemelihara Perdamaian (Women Peacekeepers)*, dilihat 29 November 2017, <<https://tni-au.mil.id/wanita-pemelihara-perdamaian-women-peacekeepers/>>.
- Tni.mil.id 2009, *Satgas Maritim TNI Konga XXVII-A/UNIFIL 2009 KRI Diponegoro-365 Siap Emban Resolusi PBB 1701*, 4 Februari, dilihat 29 November 2017, <<http://tni.mil.id/view-12281-satgas-maritim-tni-konga-xxviii-aunifil-2009-kri-diponegoro-365-siap-emban-resolusi-pbb-1701.html>>.

UN Peacekeeping n.d, *Troop and Police Contributors*,
<<https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors>>.

UN Peacekeeping 2006, *UN Mission's Summary detailed by Country, Month of Report: 30 November 2006*, 30 November, dilihat 28 November 2017,
<https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/nov06_3.pdf>.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian